



Pendapat Akhir Anggota DPRD Kapuas Hulu

Eksekutif Musti Transparan Kelola Keuangan Daerah

PUTUSSIBAU — Enam fraksi di DPRD Kapuas Hulu meminta pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu meningkatkan kinerjanya dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip kerja keras, transparan dan akuntabilitas publik oleh seluruh SKPD, maka penilaian opini wajar dengan pengecualian dari BPK-RI pada tahun 2013 berubah menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Harapan meraih WTP di tahun 2014 tergambar jelas dari penyampaian masing-masing fraksi yang dimulai dari pendapat akhir Fraksi PPP, Fraksi Bintang Keadilan, Fraksi Golkar, Fraksi Perjuangan Daerah, Fraksi PDI-P dan Fraksi Demokrat. Selain meminta eksekutif transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, legislatif meminta eksekutif menata dan meningkatkan pengelolaan aset daerah.

"Kami berharap pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam semua tahapan, baik pada saat planning, organizing, controlling maupun pertanggungjawabannya. Ini mesti dilakukan seluruh SKPD, sehingga kedepan WTP bisa



MUSTA'AN/PONTIANAK POST

TANDA TANGAN: Bupati Kapuas Hulu menandatangani naskah persetujuan Raperda menjadi Perda, didampingi oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana SH MH dan Ketua DPRD Ade Zulkifli.

diraih," ungkap Baco Maiwa, SE jurubicara Fraksi Bintang Keadilan, kemarin.

Selain masalah transparansi pengelolaan keuangan dan penataan aset. DPR melalui fraksi-fraksi juga meminta se-

luruh SKPD bekerja keras dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan PAD.

Bupati Kapuas Hulu, A.M. Nasir SH, usai pendapat akhir fraksi menyatakan apresiasi dan terimakasih atas

masukan dan saran yang disampaikan DPRD melalui fraksi-fraksi dan itu akan ditindaklanjutinya. "Kami akan terus meningkatkan kinerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah, sehing-

ga target WTP tahun depan akan tercapai. Selain itu saya juga meminta kepada seluruh SKPD dalam mengelola keuangan daerah mesti hati-hati sesuai peraturan perundangan-undangan yang ada. Sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun terus mengalami peningkatan yang lebih baik," jelas Nasir.

Dikemungkinan yang sama Bupati juga mengatakan, opini penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh BPK RI sejak empat tahun terakhir selalu memperoleh opini terbaik.

Demikian juga dalam gelar pengawasan dalam menindaklanjuti temuan-temuan, Kapuas Hulu merupakan yang terbaik di Kalbar. "Masalah aset, kami terus berusaha berbenah agar aset yang ada menjadi jelas," paparnya.

Paripurna penetapan persetujuan bersama antara Pemkab dan DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun 2013. Semua (Enam) fraksi menyatakan setuju Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda. Sidang dipimpin Ketua DPRD Ade Zulkifli SAP, dihadiri wakil Yusup Habibi, anggota, pimpinan SKPD dan jajaran Forkorpidma. (aan)